

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- MAJALAH PILARS
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEPT** OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 **26** 27 28 29 30 31

HALAMAN : 6

TAHUN 2005

Medco-PLN Jalin Kerja Sama

JAKARTA—PT Medco Energy International Tbk menandatangani nota kesepahaman (MOU) dengan PT PLN (Persero) untuk menyediakan gas bumi untuk Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) di Bali dan Sulawesi.

Direktur Keuangan PT Medco Energy International Tbk, Darmoyo Doyoatmojo mengatakan gas bumi yang akan disediakan oleh PT Medco itu berasal dari wilayah kerja-wilayah kerja milik Medco, yaitu blok Senoro-Toili, yang terletak di

Sulawesi Tengah dan blok Simenggaris, yang terletak di Kalimantan Timur.

"Perseroan memiliki cadangan gas bumi yang cukup dari kedua blok tersebut untuk memasok kebutuhan PLTG di Pulau Bali dan Pulau Sulawesi. Sistem transportasi rencananya akan menggunakan kapal *Compressed Natural Gas* (CNG). CNG, yang mempunyai jarak tempuh maksimum 1.500 kilometer," ujar Darmoyo dalam rilis yang diterima *Republika*, pekan lalu.

Untuk pengembangan sistem transportasi ini, Medco dan para pihak terkait akan menunjuk pihak lain. Penunjukannya akan ditentukan kemudian. Dia menjelaskan, jumlah kuantitas dan harga dari CNG yang akan di pasok ke PLTG di Pulau Bali dan Pulau Sulawesi ini masih akan dirundingkan dan ditentukan kemudian. ■ zak

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH FORUM
 MAJALAH PILARS
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 1

TAHUN 2005

TOLAK RENCANA KENAIKAN TDL

Pemerintah Tidak Boleh Egois

Jakarta, RM. Rencana pemerintah yang mengusulkan kenaikan tarif dasar listrik (TDL), menuai kritik. Pasalnya, kenaikan TDL dipastikan akan menambah berat penderitaan rakyat yang sudah terbebani dengan kenaikan harga BBM per 1 Oktober.

Anggota Komisi VII DPR Nizar Dahlan mengibaratkan langkah pemerintah yang akan menaikkan TDL seperti bersenang-senang di atas penderitaan rakyat. "Pemerintah harus toleransi dengan kondisi kesulitan rakyat dan jangan berpikir kesulitan pemerintah melulu. Pemerintah tidak boleh egois," kata anggota Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (BPD) ini.

Nizar juga mendesak agar PLN segera dibenahi, karena selama ini BUMN yang memonopoli sektor kelistrikan ini dinilai ti-

dak efisien. Ia meminta PLN membenahi pembelian listrik dari swasta. Anggota DPR dari Partai Bulan Bintang ini pun menyebutkan masih terjadi banyak kebocoran di PLN. "Kami masih banyak memperoleh masukan soal kebocoran, ini harus segera dibenahi," tandasnya.

Dengan berbagai alasan itu, Nizar menolak langkah pemerintah yang akan menaikkan TDL. Diakuinya, beban keuangan pemerintah sangat berat akibat kenaikan harga minyak dunia. Namun pemerintah diharapkan bisa mencari cara untuk bisa menutupi defisit anggaran ini, bukan dengan cara ikut menaikkan TDL. "SBY sudah didukung rakyat, maka juga harus cari cara untuk menyelamatkan rakyat.

Jangan cari cara yang gampang untuk menutupi defisit dengan menaikkan TDL," tandasnya.

SBY, lanjut dia, harus berupaya untuk melakukan efisiensi penggunaan keuangan negara dan juga menutup

terjadi kebocoran-kebocoran anggaran. Apalagi, disebutkan bahwa tingkat kebocoran anggaran pemerintah bisa mencapai 30 persen. "Kalau itu dibenahi, maka beban anggaran bisa berkurang," katanya. Nizar pun meminta agar pemerintah berhenti mengiming-imingi rakyat dengan dana kompensasi untuk bisa menaikkan TDL. Sebab hal ini dinilai hanya membodohi rakyat saja. ■ IMI

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- MAJALAH PILARS
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEPT** OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 **26** 27 28 29 30 31

HALAMAN : 16

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

TAHUN 2005

Privatisasi Sektor Listrik

MASIH tingginya harga minyak mentah di pasar internasional akhirnya memaksa pihak pemerintah untuk menaikkan harga tarif dasar listrik (TDL) khusus untuk rumah tangga.

Kenaikan ini jelas sangat signifikan bagi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Karena lebih dari 93% pelanggan PLN pada 2004 adalah rumah tangga.

Meski menjadi dilema, dalam jangka pendek setidaknya hanya kebijakan tersebut yang cukup rasional untuk bisa mengurangi kerugian PLN. Hal ini dilakukan sambil menunggu realisasi dari beberapa proyek infrastruktur kelistrikan yang telah direncanakan sebelumnya.

Pada analisis *Media Indonesia* (5/9), telah dipaparkan salah satu hasil studi yang dilakukan oleh LPEM FEUI mengenai 'Roadmap Pembangunan Infrastruktur Indonesia'. Studi tersebut pada dasarnya berusaha melihat dampak pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi. Salah satunya adalah soal kelistrikan.

Secara umum studi tersebut kemudian juga mencoba memberikan beberapa rekomendasi. Namun, saya melihat ada dua rekomendasi yang sangat penting untuk dicermati.

Pertama, studi tersebut melihat bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak bisa semata-mata diakibatkan oleh peningkatan stok infrastruktur.

'Pemerintah kini berada dalam situasi dilematis karena terjebak dalam pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat dan keterbatasan dana yang dimiliki.'

Hal ini disebabkan biaya yang dibutuhkan akan menjadi sangat mahal. Karenanya usaha-usaha lain seperti perbaikan iklim usaha, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta kemajuan teknologi (*technical progress*) menjadi penting dilakukan secara bersamaan.

Melalui berbagai usaha yang dilakukan tersebut, biaya yang dibutuhkan diharapkan dapat ditekan. Studi tersebut menunjukkan pembangunan infrastruktur listrik dengan skenario ini diperkirakan memerlukan dana Rp60,3 triliun pada tingkat pertumbuhan ekonomi 3,93%. Jika ingin mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi 5,14%, biaya yang diperlukan Rp62,1 triliun. Sedangkan untuk pertumbuhan 5,18% biaya yang akan digunakan ada-

lah Rp64 triliun.

Rekomendasi penting lain yang disampaikan studi tersebut adalah dengan keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah, diperlukan adanya investor swasta untuk menutupi persoalan tersebut. Namun, langkah ini memerlukan payung hukum, baik berupa undang-undang atau peraturan-peraturan lain yang mendukung hal tersebut.

Studi LPEM ini juga merekomendasikan pentingnya kestabilan atas peraturan-peraturan atau undang-undang yang ada sebagai jaminan bagi investor untuk menanamkan investasinya. Dalam konteks ketenagalistrikan, persoalan kepastian legalitas ini menjadi semakin penting menyusul pembatalan UU No 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan oleh Mahkamah Konstitusi.

Regulasi kelistrikan

Pada 15 Desember 2004 Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan keberadaan UU No 20/2002 tentang Ketenagalistrikan. Ada tiga pasal dalam UU tersebut yang ditolak oleh pihak MK. Ketiga pasal tersebut ialah Pasal 16 tentang Pemisahan Usaha Penyediaan Listrik, Pasal 17 tentang Kompetisi Usaha Listrik, serta Pasal 68 tentang Peralihan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK). Dengan pembatalan tersebut, otomatis kini UU No 15/1985 kembali diberlakukan.

Meski secara langsung pembatalan tersebut tidak mengganggu keberadaan kontrak-kontrak yang tengah berjalan, bagaimanapun juga ada beberapa hal yang bisa dijadikan catatan dari pembatalan tersebut.

Pertama, tidak adanya pemecahan (*unbundling*) PLN serta berbagai usaha yang menyangkut kelistrikan. Sebagai akibatnya, tidak ada kompetisi dalam industri kelistrikan.

Kedua, melalui pembatalan ini PT. PLN jelas akan kembali memonopoli perusahaan listrik, terutama pada daerah-daerah yang selama ini telah mereka kuasai.

Padahal kalau mau mencermati lagi isi UU No 20 Tahun 2002, regulasi ini sebenarnya telah berusaha untuk membuka peluang adanya kompetisi dalam bidang kelistrikan. Kompetisi ini muncul sebagai hasil dipecahnya beberapa sektor di dalam ketenagalistrikan seperti pada pembangkit, sistem operator, transmisi, distribusi, dan agen penjualan.

Melalui keberadaan kompetisi tersebut terutama di bidang pembangkit, diharapkan akan dihasilkan tenaga listrik dengan harga lebih murah. Sedangkan kompetisi di bidang agen penjualan akan

menciptakan pelayanan yang lebih baik.

Sebagai reaksi atas pembatalan tersebut, pemerintah tengah menyusun RUU Ketenagalistrikan. Dalam soal perusahaan tenaga listrik, tampaknya RUU ini kemudian kembali menawarkan peran pemerintah yang besar. Terutama pula kepada pihak PLN. Sehingga keinginan untuk melakukan pemecahan usaha menjadi tertutup.

Jadi secara substansial, memang tidak ada perubahan signifikan dalam RUU Ketenagalistrikan ini bila dibandingkan dengan UU No 15 Tahun 1985. Namun, seperti juga tercantum dalam UU No 15 Tahun 1985, RUU ini juga tetap kembali menyediakan ruang bagi pihak swasta untuk turut serta dalam usaha penyediaan tenaga listrik nasional (lihat tabel).

Kalau kemudian kita cermati lagi, sebenarnya keinginan untuk menciptakan kompetisi sebagai dasar peningkatan efisiensi usaha dalam sektor ketenagalistrikan justru kurang tecermin pada RUU ini. Padahal kompetisi dan efisiensi adalah dua aspek penting dalam sebuah usaha yang lebih berorientasi kepada kepuasan konsumen.

Selain itu, sebenarnya UU No 20 Tahun 2002 sudah merupakan cerminan atau mengacu kepada UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat yang memang secara eksplisit menentang praktik monopoli.

Berbicara soal monopoli, satu hal yang perlu diingat ialah dalam konteks ekonomi, monopoli bukanlah sesuatu yang ilegal, selama hal tersebut merupakan monopoli alamiah. Monopoli alamiah yang dimaksudkan di sini ialah sebuah monopoli yang memang benar-benar dihasilkan dari sebuah persaingan sehat.

Jadi ketika sebuah perusahaan kemudian menjadi besar dan menguasai lebih dari setengah pasar yang ada, hal tersebut tetaplah legal. Sebaliknya, jika monopoli dihasilkan oleh sebuah perjanjian atau regulasi tertentu, hal tersebut menjadi tidak sah dan dapat dikategorikan sebagai sebuah praktik monopoli.

Mengacu kepada hal-hal seperti inilah, kemudian kita dapat menilai RUU Ketenagalistrikan yang merupakan revisi atas pembatalan UU No 20 Tahun 2002 pada dasarnya memiliki pretensi dan kecenderungan untuk menciptakan praktik monopoli. Proses pemecahan (*unbundling*) usaha penyediaan tenaga listrik sebagai sebuah bentuk untuk lebih meningkatkan kompetisi justru ditutup oleh pembatalan UU oleh MK.

Sementara itu, pemerintah yang masih berada pada posisi dilematis justru terjebak di antara pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat dan keterbatasan dana yang dimiliki. Sehingga pada akhirnya, mengabaikan kemampuan kompetisi yang seharusnya menjadi semangat tiap usaha di Indonesia, termasuk salah satunya adalah usaha penyediaan tenaga listrik.

● Nugroho Pratomo, Litbang Media Group

UU No 20 Tahun 2002

Pasal 16

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan secara terpisah oleh Badan Usaha yang berbeda

Pasal 17

- (1) Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan kompetisi.
- (2) Badan Usaha di bidang pembangkitan tenaga listrik di satu wilayah kompetisi dilarang menguasai pasar berdasarkan Undang-undang ini.
- (3) Larangan penguasaan pasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi segala tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat antara lain meliputi:
 - a. menguasai kepemilikan;
 - b. menguasai sebagian besar kapasitas terpasang pembangkitan tenaga listrik dalam satu wilayah kompetisi;
 - c. menguasai sebagian besar kapasitas pembangkitan tenaga listrik pada posisi beban puncak;
 - d. menciptakan hambatan masuk pasar bagi Badan Usaha lainnya;
 - e. membatasi produksi tenaga listrik dalam rangka mempengaruhi pasar;
 - f. melakukan praktik diskriminasi;
 - g. melakukan jual rugi dengan maksud menyingkirkan usaha pesaingnya;
 - h. melakukan kecurangan usaha; dan/atau
 - i. melakukan persekongkolan dengan pihak lain.

Pasal 68

Pada saat Undang-undang ini berlaku, terhadap Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan dianggap telah memiliki izin yang terintegrasi secara vertikal yang meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik dengan tetap melaksanakan tugas dan kewajiban penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sampai dengan dikeluarkannya Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik berdasarkan Undang-undang ini.

UU No 15 Tahun 1985

Pasal 7

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan oleh Negara dan diselenggarakan oleh badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan.
- (2) Dalam upaya memenuhi kebutuhan tenaga listrik secara lebih merata dan untuk lebih meningkatkan kemampuan negara dalam hal penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan sendiri, sepanjang tidak merugikan kepentingan negara, dapat diberikan kesempatan seluas-luasnya kepada koperasi dan badan usaha lain untuk menyediakan tenaga listrik berdasarkan Izin Usaha Ketenagalistrikan.
- (3) Izin Usaha Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikecualikan bagi usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang jumlah kapasitasnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI HUBUNGAN ANTARA PEMEGANG KUASA USAHA KETENAGALISTRIKAN DAN PEMEGANG IZIN USAHA KETENAGALISTRIKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DENGAN MASYARAKAT DALAM USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

Pasal 15

- (1) Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum wajib:
 - a. menyediakan tenaga listrik;
 - b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat;
 - c. memperhatikan keselamatan kerja dan keselamatan umum.
- (2) Ketentuan tentang hubungan antara Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum dengan masyarakat yang menyangkut hak kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing diatur dengan Peraturan Pemerintah

Sumber: dikutip dari UU No 20 Tahun 2002 dan UU No 15 Tahun 1985
Tentang Ketenagalistrikan

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- MAJALAH PILARS
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN			FEB			MAR			APR			MEI			JUN			JUL			AGST			SEPT			OKT			NOV			DES		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					

HALAMAN : 7

TAHUN 2005

Kemarau, Tak Ada Pemadaman Listrik

JAKARTA - PLN menjamin tidak akan terjadi pemadaman listrik, meskipun musim kemarau datang hingga Desember 2005. Hingga saat ini, operasional pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Saguling, Cirata, dan Jatiluhur masih relatif normal, walau debit air Sungai Citarum Jawa Barat mulai turun.

"Cuaca bagus, sehingga debit air tidak turun hingga 50-60% seperti perkiraan awal. Selain itu, pasokan bahan bakar minyak (BBM) ke sejumlah pembangkit juga masih lancar," kata General Manager Pusat Pengendalian dan Pengaturan Beban PLN Jawa Bali Muljo Adji kepada *Investor Daily*, Minggu (25/9).

PLN pernah memperkirakan, musim kemarau tahun ini pasokan listrik Jawa Bali kritis, karena turunnya kapasitas cadangan daya listrik menjadi 120 MW, dari kondisi cadangan normal 600 MW. Sementara itu, pemakaian listrik pada beban puncak meningkat hingga 28,7% menjadi 15.245 MW, dari kondisi pemakaian normal 14.920 MW. (ari)

5.

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH FORUM
 MAJALAH PILARS
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEPT** OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 **26** 27 28 29 30 31

HALAMAN : 5

TAHUN 2005

PLN beli listrik swasta yang *idle*

SURABAYA: PT PLN akan melanjutkan pembelian energi dari pembangkit milik swasta yang *idle* (tak terpakai), guna mencukupi kebutuhan pelanggan listrik di sistem Jawa-Madura-Bali yang mencapai beban puncak 14.400 MW.

Langkah tersebut dilakukan akibat ketidakmampuan mendirikan pembangkit berkapasitas 600 MW yang membutuhkan investasi Rp6 triliun.

Selain itu, PLN juga mengencarkan hemat energi kepada seluruh konsumen listrik, dimana program tersebut mampu menghemat penggunaan BBM di pembangkit senilai Rp15 miliar dalam jangka dua minggu.

Wakil Ketua Tim Kerja *Demand Side Management* PT PLN, Syaiful Bakhri Ibrahim, menyatakan perlunya mengencarkan penghematan/pemangkasan pemakaian listrik pada pukul 17.00-22.00, mengingat penambahan pelanggan eksisting tidak dapat dihentikan.

"Selain mengupayakan perubahan perilaku pelanggan agar menghemat listrik, PLN juga membeli listrik dari pembangkit swasta seperti PT Emdeki di Jatim dan PT Krakatau Steel di Banten. Hal itu penting agar PLN bisa mengurangi biaya bahan bakar," ujarnya, pekan lalu. (BISNIS/AAC)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- MAJALAH PILARS
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEPT** OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 **26** 27 28 29 30 31

HALAMAN : 23

TAHUN 2005

HARGA BBM

PLN di Kaltim Mulai Beralih ke Gas

BALIKPAPAN, KOMPAS — Mengantisipasi tingginya harga bahan bakar minyak dunia, pembangkit listrik tenaga diesel di Kalimantan akan beralih ke pembangkit listrik tenaga gas dan uap. Pengalihan bahan bakar ini sekaligus meningkatkan kapasitas tenaga listrik di Kalimantan Timur dari 60 megawatt menjadi 150 megawatt.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro mengatakan hal itu sesuai menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman (MOU) antara PT PLN dan Badan Pengelola Migas di Balikpapan, Sabtu (24/9).

Menurut Purnomo, sudah lama Indonesia bercita-cita menggantikan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) berbahan bakar minyak dengan pembangkit listrik tenaga gas dan uap (PLTGU).

Selain untuk mengatasi menipisnya cadangan minyak bumi Indonesia, juga mengantisipasi melonjaknya harga minyak dunia. Cita-cita ini tidak kunjung terwujud karena harga BBM terlampau murah.

Di Indonesia, lanjut Purnomo, sekitar 54 persen kebutuhan energi masih bertumpu pada BBM sehingga energi lainnya kurang dimanfaatkan. "Karena itu harus ada kebijakan radikal, yakni mendorong digunakannya energi non-BBM," katanya. Listrik Jawa-Bali, lanjutnya, mulai 2006 akan menggunakan bahan bakar non-BBM karena lebih efisien.

Menurut General Manager PT PLN Kaltim, Arifin Syah, jumlah pelanggan di Kaltim saat ini sekitar 420.000, naik sekitar 14 persen per tahun. Kapasitas listrik 60 megawatt kurang memadai sehingga penggunaan gas untuk menambah kapasitas merupakan alternatif paling memungkinkan, efisien, dan ramah lingkungan. Diharapkan pada 2007, PLTGU sudah bisa direalisasikan. (THY)

7

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH FORUM
 MAJALAH PILARS
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEPT** OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 **26** 27 28 29 30 31

HALAMAN : A.11

TAHUN 2005

Warga Segel Proyek SUTET

KLATEN — Proyek pembangunan saluran udara tegangan ekstratinggi (SUTET) milik PLN yang menghubungkan Klaten-Tasikmalaya dihentikan paksa oleh warga Desa Jimbung, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Alasan warga, proyek yang menghubungkan jaringan listrik Surakarta-Tasikmalaya ini membahayakan karena berada di tengah-tengah perkampungan mereka.

Warga kemarin mendatangi lokasi proyek dan meminta para pekerja menghentikan pembangunan fondasi. Penduduk kemudian "menyegel" lokasi proyek dengan sebuah papan bertulisan "lokasi ini disegel warga". Penduduk mendesak agar jalur SUTET dibelokkan ke persawahan yang ada di sebelah desa sehingga jaringan listrik tak

melintasi permukiman warga.

"Penduduk khawatir pembangunan SUTET akan mengakibatkan warga mengalami cacat atau pohon tak mau tumbuh," kata Nur Wihanda, warga Jimbrung, kemarin.

Warga yang tergabung dalam Komunitas Warga Peduli SUTET (KWPS), kata Wihanda, tak berniat menghalangi pembangunan jalur distribusi aliran listrik. Namun, katanya, kalau PLN tetap mendirikan di tengah kampung, warga nekat akan mempertahankannya sekuat tenaga.

Warga sudah melayangkan protes kepada PLN agar pembangunan dibatalkan dan dibelokkan. Tapi beberapa hari terakhir ini kontraktor kembali mengerjakan proyek dengan membangun fondasi SUTET 400 KV itu. "Karena

itu, warga emosi dan menghentikan paksa," kata Wihanda.

Pembangunan SUTET nomor 40 dan 41 ini akan menghubungkan aliran listrik dari Klaten hingga ke Tasikmalaya. Di sekitar kampung itu juga telah dibangun dua tower yang sama. Meskipun proses pembangunan sudah berjalan cukup lama, warga berkeras menolak proyek ini.

Secara terpisah, kontraktor pembangunan tower SUTET, ABB, melalui pelaksana teknisnya, M. Arifin, mengaku bahwa dirinya hanya mendapat perintah dari PLN untuk meneruskan pembangunan. Namun, pembangunan dihentikan setelah ada protes dari warga. Padahal, katanya, proyek ini harus selesai setidaknya pada November. ● ANAS SYAHRIUL

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- MAJALAH PILARS
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEPT** OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 **26** 27 28 29 30 31

HALAMAN : 7

TAHUN 2005

Janji PLN Memberi Reduksi

Janji PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang akan memberikan reduksi atas ganti rugi biaya karena pemadaman listrik tanggal 18 Agustus 2005 tidak terbukti. Di *Kompas*, 22 Agustus 2005 dijelaskan bahwa PLN berjanji akan memberikan kompensasi kepada pelanggan dan akan diberitahukan melalui rekening listrik yang diterima. Dalam rekening tersebut akan dicantumkan reduksi yang diterima, yaitu 10 persen dari biaya beban. Ini akibat pemadaman tanggal 18 Agustus 2005.

Kenyataannya setelah saya membayar tagihan rekening bulan September 2005, reduksi yang dijanjikan PLN itu ternyata tidak ada. Padahal, di daerah rumah saya pemadaman listrik berlangsung sekitar 10 jam (pukul 10.30 WIB sampai dengan pukul 20.30 WIB).

Sebagai pelanggan saya merasa dibohongi dan dibodohi PLN. Seharusnya PLN jangan mau menang sendiri.

FARIDA ARIANI
Pinang Ranti RT 014 RW 002,
Jakarta Timur

MONITOR BERITA

BERITA INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH FORUM
 MAJALAH PILARS
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 10

TAHUN 2005

**BUDAYA HEMAT:
Perlu Contoh Baik**

SEORANG antropolog, Koentjaraningrat, membedakan budaya modern dan budaya tradisional. Budaya modern punya sifat-sifat seperti hemat, efisien, menghargai waktu, dan menghargai prestasi orang lain. Sementara budaya tradisional disifatkan dengan sikap boros, tidak menghargai waktu, kurang menghargai prestasi, malas, lambat, dan sebagainya.

Menurut Mochtar Lubis, masyarakat Indonesia sulit maju karena budayanya yang bertentangan dengan budaya modern tadi. Masyarakat kita cenderung boros dalam menggunakan apa pun, termasuk dalam penggunaan energi seperti BBM.

Masyarakat Indonesia juga bersifat paternalistik, mengikuti perilaku pemimpinnya. Jika pemerintah mengimbau agar masyarakat hemat dalam penggunaan energi, maka pemerintah harus lebih dulu memberikan contoh. Jika tidak, imbauan itu tidak akan diikuti. Namun lain dalam hal imbauan pemerintah soal penghematan energi.

Imbauan itu disambut baik oleh masyarakat karena para pemimpin mampu memberikan contoh yang baik. Di Pulau Jawa saja, menurut Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, imbauan penghematan energi telah diikuti oleh masyarakat pengguna listrik. Penghematan dapat dilakukan sampai setengahnya.

Ternyata kita bisa melakukan penghematan, meskipun budaya modern belum sepenuhnya dijiwai oleh masyarakat kita. Sikap hemat akan menguntungkan semua pihak. Mudah-mudahan hidup hemat jadi sikap keseharian kita.

ARDINATA
Jalan Sawo Manila
Pejaten
Jakarta Selatan
ardi.2005@piasa.com

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH FORUM
 MAJALAH PILARS
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEPT** OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 **26** 27 28 29 30 31

HALAMAN: 66

TAHUN 2005

NUKLIR, PILIHAN TERAKHIR

tidak terjadi krisis moneter 1998, mungkin saat ini Indonesia sudah memiliki satu pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) yang berlokasi di Semenanjung Muria, Jepara, Jawa Tengah. Juga, sekarang, mungkin tengah dibangun beberapa PLTN lainnya. Dan PT PLN—BUMN yang ditugasi mengurus kelistrikan—mungkin tidak perlu sampai pusing memikirkan kenaikan harga BBM seperti sekarang ini.

Tapi sudahlah, yang jelas krisis keuangan menyebabkan rencana pembangunan PLTN Muria molor menjadi tahun 2010,

dan diperkirakan baru akan dioperasikan pada tahun 2014. Menurut Yogo Pratomo, Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi (LPE) Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, pemerintah sudah menyadari bahwa minyak bumi akan habis. "Karena itu pembangunan pembangkit berbahan baku BBM distop, dan mengupayakan pembangkit berbasis non-BBM," kata Yogo.

Dalam rangka itu pula, belum lama ini pemerintah telah melandungkan pembangunan 8 proyek pembangkit listrik tenaga gas dan uap (PLTGU) berteknologi baru, dengan sistem BOT (*built operating transfer*). Kedelapan proyek tersebut antara lain PLTGU Cirebon, PLTGU Pasuruan, dan PLTGU Sibolga. Pembangkit listrik ini nantinya akan dioperasikan oleh swasta, dan listriknya dijual kepada PLN, kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Mungkin swasta asing yang nanti akan mendapatkannya, meng-

ingat pemilik teknologi ini baru beberapa gelintir perusahaan besar saja. Siemens (Jerman), misalnya.

PLTN sendiri sebenarnya merupakan pilihan terakhir. Namun, dibandingkan dengan energi lainnya, pembangkit listrik berbahan baku uranium ini relatif lebih murah. Biaya produksi PLTN berkisar US\$ 0,03-US\$ 0,04 per kWh. Angka itu jauh lebih murah dibandingkan dengan pembangkit listrik berbahan batu bara (US\$ 0,04) atau BBM (US\$ 0,065). Ini bisa terjadi karena komposisi biaya bahan baku uranium hanya 5% dari harga listrik. Sedangkan batu bara dan BBM di atas 40%. "Karena itu, dampak kenaikan harga uranium terhadap tarif listrik kecil sekali," kata Soedyartomo Soentono, Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional.

Betul, investasi yang dibutuhkan untuk membangun PLTN lebih mahal dibandingkan mendirikan PLTGU atau pembangkit ber-

bahan baku BBM. Tapi, PLN didesain untuk beroperasi selama 60 tahun. Sedangkan PLTGU atau pembangkit listrik lainnya hanya didesain untuk 25-30 tahun. Karena itu, biaya penyusutan PLN jauh lebih murah dibandingkan pembangkit listrik lainnya. Selain itu, polusi yang ditimbulkan PLTN juga relatif lebih kecil dibandingkan pembangkit yang menggunakan batu bara atau BBM. "Radiasinya juga lebih mudah dikendalikan dibandingkan mengendalikan virus," kata Soedyartomo.

Yang lebih penting lagi, persediaan bahan baku uranium masih cukup banyak. Selain di Kanada, Australia, dan Afrika selatan, Indonesia sendiri memiliki deposit uranium yang cukup besar, yakni di Kalimantan. "Walaupun kita punya, sebaiknya kita membeli dari negara lain. Kalaupun harganya naik, pengaruhnya sedikit sekali," tutur Soedyartomo. □

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- MAJALAH PILARS
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

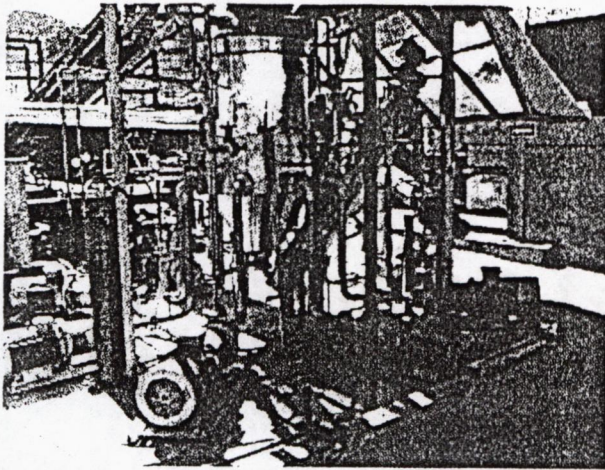
MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEPT** OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 **26** 27 28 29 30 31

HALAMAN : 14

TAHUN 2005



Biodiesel Sampah Organik

Di Indonesia, biodiesel dibuat dari minyak biji jarak dan jelantah. Di Jerman, biodiesel dari sampah organik! Sang ilmuwan, Christian Koch, meyakini bahan bakar yang dihasilkan-nya berkualitas tinggi. Kini ia telah memegang hak paten untuk teknologi KDV

500, yang dipakainya mengubah sampah, kertas, kain, rumput, ban bekas, dan plastik menjadi solar. Campuran berbagai bahan organik itu dipanaskan sampai 300 derajat Celsius untuk mengekstraksi hidrokarbon. Lewat proses depolimerisasi katalisis tanpa tekanan, hidrokarbon diubah menjadi biodiesel. Dengan mesin KDV 500, pria berusia 55 tahun dari Kleinhartmannsdorf ini memproduksi biodiesel seharga 23 sen euro tiap liter-nya, hanya seperlima harga solar di Jerman. Metode pembuatan minyak mentah yang dikembangkan ilmuwan Jerman itu diharapkan dapat mengatasi masalah harga bahan bakar minyak yang melangit. "Saya memakainya untuk mobil diesel biasa," katanya. "Saya telah menempuh 170 kilometer tanpa masalah," ia menambahkan.

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- MAJALAH PILARS
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 66

TAHUN 2005

Tarif Baru Setelah Kenaikan BBM

Setelah rencana kenaikan harga BBM, dalam waktu dekat, tarif listrik juga akan dinaikkan. Kapan waktunya dan berapa besarnya kenaikan belum diumumkan. Yang pasti, tahun 2007 nanti tak ada lagi subsidi buat listrik.

Nurul Kolbi dan Sumi Fatimah S.

berita rencana kenaikan harga BBM, pekan lalu, Direktur Utama PT PLN, Eddie Widiono, memutuskan untuk mengikuti langkah Pertamina. Cuma, berbeda dengan Pertamina yang masih merasasiakan besarnya kenaikan harga BBM, PLN justru sudah memastikan bahwa tarif dasar listrik akan dinaikkan sebesar 20% hingga 50%. Lantas, dari mana PLN memperhitungkan harga baru tersebut?



EDDIE WIDIONO

Kamis pekan lalu, *hearing* dengan Komisi VII DPR-RI, Eddie sebenarnya sudah mulai gamblang. Ia membuka-buka angka biaya produksi listrik yang dijual kepada masyarakat. Ini, menurut Eddie, bermula dari kenaikan harga BBM dan kurs dolar. Akibatnya, biaya pokok penyediaan (BPP) listrik juga ikut naik. Saat ini rata-rata BPP mencapai US\$ 0,065 atau sekitar Rp 670 per kWh. Sedangkan TDL yang berlaku hanya Rp 587.

Yang juga turut berperan dalam naiknya ongkos produksi listrik adalah biaya operasi, terutama biaya penyusutan dan jumlah bunga yang harus dibayar. Lebih jelasnya, menurut Eddie, mengulangi alasan yang selalu dikemukakan pemerintah, jika BPP tambah mahal, maka tambah besar pula subsidi negara untuk mempertahankan tarif listrik bagi rakyat. Untuk tahun ini, PLN mengajukan permintaan subsidi Rp 15,64 triliun, tapi yang disetujui pemerintah sebesar Rp 12,4 triliun. "Padahal, untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM,

DOK. TRUST/CATUR EKONO

PLN perlu dana untuk membangun pembangkit listrik non-BBM," kata Eddie.

Maka, ya itu tadi. Eddie pun mengusulkan menaikkan TDI secara bertahap hingga mendekati BPP. Tak ada yang kaget, meskipun banyak yang cemas. Harga-harga pasti akan naik, dan gaji pegawai negeri yang akan naik 20% bisa tenggelam lagi. Berarti daya beli masyarakat akan tetap rendah, dan perdagangan akan lesu. "Ibarat menghadapi musuh, kini industri tekstil dan produk tekstil semakin diserang dari segala penjuru," kata Lili Asjudiredja, Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jawa Barat.

Kalau Lili merasa kena tohok, itu memang wajar. Menurut Direktur PT Tri Mumpung Rancaekek itu, selama ini industri tekstil sudah kena berbagai ganjalan, mulai dari kenaikan harga BBM untuk indus-

tri hingga maraknya tekstil selundupan. Akibatnya, menurut Lili, sampai saat ini sudah ada 350 pabrik tekstil di Jawa Barat ditutup karena tidak mampu bersaing gara-gara makin mahal biaya produksi. "Dengan tarif listrik yang lama saja, kami sudah sulit menyaingi produk tekstil dari RRC. Apalagi sekarang," kata Lili.

Menurut kalkulasi pemerintah, para pengusaha tekstil sebenarnya tidak perlu mengeluh bila tarif listrik naik. Sebab, pengaruh dari kenaikan listrik terhadap total biaya produksi masih dalam batas-batas wajar. Berdasarkan perhitungan seorang pejabat PLN, jika tarif dinaikkan 20%-30%, maka itu hanya akan menaikkan biaya energi pabrik tekstil sebesar 1,5% hingga 2%. Tapi, orang PLN itu hanya menggelengkan kepala ketika ditanya berapa kenaikan biaya produksi tadi bila ditambah

dengan kenaikan harga BBM. Yang pasti, dengan kenaikan tarif sebesar itu, PLN akan menjadi BUMN yang punya masa depan cerah. Apalagi, mulai tahun 2007, subsidi untuk konsumen kelas bawah pun rencananya akan dihapus.

Di masa mendatang, kenaikan tarif listrik akan dilakukan secara otomatis. Mak-sudnya, jika pemerintah sudah memandang perlu mengerek tarif baru, maka hal itu akan segera dilaksanakan. Dengan begitu, kenaikannya tidak terlalu besar: bisa 3%, boleh juga 5%. Formula ini diterapkan dengan mempertimbangkan tingkat inflasi, nilai tukar, harga BBM, serta perubahan harga tenaga listrik. "Daripada seperti sekarang, langsung naik 20%, kan lebih baik dibiarkan mengambang seperti kurs dolar," kata seorang pejabat PLN.

Lalu, kenapa sekarang kenaikannya cukup tinggi? Nah, untuk pertanyaan yang satu ini, pemerintah sudah menyiapkan jawabannya. Menurut Eddie, kenaikan seperti ini sengaja diusulkan dengan tujuan agar PLN bisa menghimpun dana untuk investasi baru. Seperti diketahui, untuk melepaskan diri dari ketergantungan terhadap BBM, PLN merencanakan membangun 15 pembangkit listrik non-BBM. Maklum, saat ini saja, setiap tahunnya PLN membutuhkan 11,44 juta kiloliter solar. "Untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM, PLN membutuhkan dana untuk membangun pembangkit listrik non-BBM," kata Eddie.

Apakah rencana kenaikan tarif kali ini—yang diduga akan terjadi tidak lama lagi—bakal menjadi tonggak sejarah penghapusan subsidi listrik secara total? Jawabannya ada pada keputusan pemerintah nanti. □

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- MAJALAH PILARS
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 14

TAHUN 2005

■ Cepu

Berebut Sepuluh Persen

Bojonegoro tak lagi me-
monopoli saham daerah.
Jawa Timur merencanakan
pembentukan konsorsium.

KEDIAMAN Gubernur Jawa Timur kedatangan rombongan tamu penting. Selasa pekan lalu Gubernur Jawa Tengah Mardiyanto, Bupati Bojonegoro H.M. Santoso, serta Bupati Blora Basuki Widodo termasuk di antara rombongan yang bertamu ke rumah Imam Utomo di Jalar. Imam Bonjol itu

Selain tiga pejabat itu hadir pula pengusaha partikelir Danlan Iskan pengendali kelompok media Jawa Pos sekaligus bos Fanca Wira Usaha Jatim (badan usaha milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur).

Pertemuan itu digagas oleh Imam. Hanya ada satu agenda dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu yaitu menyimak penjelasan Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) tentang berapa besar potensi cadangan minyak Blok Cepu yang ada di wilayah Pemerintah Kabupaten Blora dan berapa besar yang ada di wilayah Bojonegoro.

Pertemuan itu merupakan potret terkumpulnya pengelolaan Blok Cepu. Jatah kepemilikan (participating interest) untuk daerah yang besarnya 10 persen tak lagi dimonopoli oleh Bojonegoro. Kabupaten lain yang ketempatan cadangan minyak, seperti Blora, juga diundang untuk menikmati rezeki Cepu.

Bagi-bagi rezeki ini membuntuti terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005, pertengahan September lalu. Peraturan pemerintah (PP) tersebut menggantikan PP Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Sebenarnya hanya ada satu perbedaan mendasar antara PP yang lama dan yang baru. PP No. 34 memperbolehkan adanya pengecualian dalam ketentuan pokok kontrak kerja sama (KKS) apabila ada kepentingan nasional yang mendesak.

Peraturan pemerintah baru itu mendeskripsikan kepentingan nasional yang mendesak sebagai usaha mempercepat peningkatan produksi minyak dan gas bumi nasional. Salah satu ketentuan pokok KKS yang boleh berbeda dengan aturan yang telah ditetapkan adalah ketentuan tentang pembagian *participating interest* kepada daerah.

Dalam PP yang lama, pemerintah daerah yang berhak ikut andil adalah daerah penghasil, yaitu pemerintah kabupaten tempat cadangan minyak atau gas berada. Untuk Blok Cepu, yang memiliki lebih dari 20 saham minyak, penentuan daerah penghasil ini menjadi rumit karena cadangan minyak tersebut di dua kabupaten Blora di Jawa Tengah dan Bojonegoro di Jawa Timur. Dua kabupaten lain yang dianggap ketempatan cadangan minyak Cepu adalah Tuban dan Purwodadi.

Dalam kesepakatan pokok yang diteken oleh tim negosiasi dan ExxonMobil akhir Juni lalu, paten saham daerah jatuh ke tangan Bojonegoro. Selain memiliki cadangan terbesar, Bojonegoro saat itu terpilih karena lokasi pengeboran berada di kota tersebut.

14

Keputusan itu memancing ketidapuasan pemerintah kabupaten lain yang juga ketempatan cadangan minyak. Untuk mencegah "perang minyak" antar kabupaten, status Bojonegoro akhirnya dianulir. Pemerintah pusat memutuskan membicarakan lagi pemerintah daerah mana saja yang berhak atas *participating interest*.

Yang sudah tancap gas adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Niat untuk membentuk konsorsium dengan beberapa pemerintah daerah lain telah dikumandangkan. Yang sudah pasti akan diajak adalah Pemerintah Provinsi Jawa

Tengah, Pemerintah Kabupaten Rembang, dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Jawa Timur juga telah menyiapkan perusahaan yang dimilikinya, Panca Wira Usaha, untuk mengelola saham partisipasi di Cepu.

Masalahnya, tiap pemerintah daerah tentu sudah punya hitung-hitungan sendiri berapa jatah yang ingin mereka kantongi. Jembatan untuk mempertemukan keinginan para pemerintah daerah itu adalah pertemuan dengan para geolog pekan lalu. Pihak Ja-Tim maupun Ja-Teng akhirnya tidak ngotot meminta sesuai keinginan masing-masing karena ada hitung-hitungannya. "ujai Inam.

Dasar hitungan yang dimaksud adalah kalkulasi IAGI tentang cadangan minyak yang ada di wilayah Blora dan Bojonegoro. Presiden IAGI Andang Bachtiar, menjelaskan data yang dipergunakan timnya adalah data sekunder dari Humpuss Petrogas atau sebelum Blok Cepu diambil alih oleh ExxonMobil.

Pada data yang dipergunakan IAGI ada 29 prospek (titik sumur minyak yang belum dibor). Dari 29 prospek yang mengandung cadangan minyak dalam jumlah besar itu, IAGI mengkaji 23 prospek.

Kesimpulannya yang disimpulkan IAGI adalah Jawa Timur layak mendapatkan hak sebesar 67,23 persen. Sisanya 32,73 persen merupakan milik Jawa Tengah.

Angka itu masih belum final. Ujai Inam. Kalkulasi IAGI tersebut masih akan dicocokkan dengan hasil perhitungan tiap-tiap pemerintah daerah. Langkah berikutnya adalah berkonsultasi dengan DPRD. Setelah itu barulah pemerintah daerah mengajukan angka yang mereka inginkan ke presiden.

Yang paling meradang dengan keputusan dari pemerintah itu, gagasan pembentukan konsorsium yang disodorkan oleh Jawa Timur adalah Bojonegoro. Serderet rencana pembangunan seperti pembuatan jalan lingkar selatan sepanjang 112 km yang disusun oleh pemerintah kabupaten, terancam berantakan jika mereka harus membagi saham di Cepu.

Maklumlah, Bojonegoro saat ini sudah menggandeng investor, yaitu Surya Energi Raya (SER), milik pengusaha Surya Paloh. SER berminat untuk modal bersama dengan Asa Dharma Sejahtera milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. (lihat Tempo, 3 Agustus 2005). "Bojonegoro menolak gagasan itu," ujar Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Tamam Syaifuddin.

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH FORUM
 MAJALAH PILARS
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 58

TAHUN 2005

AC yang Hemat Energi dan Ramah Lingkungan

Peneliti ITB berhasil menciptakan *air conditioner* (AC) atau pendingin ruangan yang irit energi dan ramah lingkungan. AC yang menggunakan hidrokarbon ini lebih irit energi 20% dibandingkan freon.

Riza Sofyat dan Wisnu Arto Subari

namanya pucuk dicinta ulam tiba. Di saat harga BBM melonjak serta pemanasan global akibat efek rumah kaca yang disebabkan penggunaan freon semakin menggilai, seorang peneliti ITB, Prof. Dr. Aryadi Suwono, berhasil menciptakan *air conditioner* (AC) alias pendingin ruangan tanpa freon dan irit energi. AC *made in* peneliti di kampus Ganesha ini menggunakan hidrokarbon. Sebagai pengganti freon, hidrokarbon terbukti bisa mengirit energi sampai 20 persen. Sungguh pantas jika Aryadi mendapat penghargaan khusus dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 17 Agustus 2005 lalu.

Keberhasilan Aryadi menciptakan AC berbahan pendingin hidrokarbon bukan diperoleh dalam satu atau dua tahun. Ia telah melakukannya sejak 1983. Penelitian yang dilakukan oleh Kepala Pusat Penelitian Laboratorium Termodinamika ITB ini termasuk program Riset Unggulan Terpadu Kementerian Riset dan Teknologi.

Alasan Aryadi memilih hidrokarbon untuk diteliti sebagai pengganti freon sederhana saja: hidrokarbon memiliki sifat

sebagai pengantar panas yang baik. Karena itu pemanfaatan panasnya lebih efisien, sehingga lebih hemat energi dibanding freon. Selain itu, kekentalan gas hidrokarbon lebih rendah ketimbang freon. Karena itu kebutuhan daya pada kompresor untuk mendorongnya menjadi turun.

Selanjutnya, panas laten hidrokarbon juga lebih tinggi ketimbang freon. Sehingga hanya dengan penggunaan sedikit hidrokarbon saja, panas yang dihasilkan

sepadan dengan pemakaian freon dalam jumlah besar. Untuk gamanya, ia bisa menghasilkan dingin yang sama dengan pemakaian freon sebanyak 100 gram. Untuk tiap 1 kilogram, hanya dibutuhkan freon karbon 350 gram. Sungguh hemat. "AC pendingin hidrokarbon ini ramah lingkungan, tidak seperti freon yang merusak lingkungan," kata Aryadi.

Dari penelitian itu, Aryadi

timnya mendapatkan tiga bahan pendingin yang berasal dari hidrokarbon, yaitu: *hydrocarbon-12* (HCR-12), HCR-22, dan HCR-134a.

Seperti penggunaan bahan pendingin atau *refrigerant* freon (R-12), R-22 lebih berbahaya 6.000 kali dan R-134a lebih berbahaya 1.600 kali dari pada efek gas karbon dioksida yang dihasilkan freon. Sedangkan penggunaan hidrokarbon mengakibatkan efek rumah kaca empat kali lebih aman dibanding gas karbon dioksida. "Melihat kenyataan itu, untuk menyelamatkan bumi maka sangat signifikan bila hidrokarbon menggantikan fungsi freon sebagai media pendingin," tutur Aryadi. Apalagi, kata penerima penghargaan Habibie Award tahun 2001 ini, harga hidrokarbon lebih murah 1,5 kali lipat dibandingkan hidrokarbon per tabung dengan ukuran yang sama.

Atas dasar itulah Aryadi kemudian mengembangkan hidrokarbon untuk digunakan pada skala industri, yaitu sebagai media pendingin AC. Dan oleh mantan seorang mahasiswanya yang pernah membantu penelitian itu yang kini telah jadi pengusaha, Ahmad Fahmi, teknologi baru ini ditangkap sebagai peluang usaha. Fahmi memulainya dengan mendirikan perusahaan PT Citra Total Buana Biru. Pada tahun 1997 ia berhasil memproduksinya dalam bentuk AC hidrokarbon dengan merek *Hyvol*. Pemakaian AC hidrokarbon kini bisa dilihat dan dirasakan dinginnya di Hotel Gran Melia, Jakarta, dan pada puluhan gedung yang tersebar di Ibu Kota.

SESUAI DENGAN INSTRUKSI PRESIDEN

Pemakaian hidrokarbon kini juga sudah dikembangkan dalam bentuk AC mobil. Itu dapat dilihat pada sejumlah bengkel mobil di Jabotabek yang kerap menawarkan AC buatan PT Citra Total Buana Biru. Dari pabriknya yang berlokasi di Bekasi, Fahmi mampu memproduksi 20 ton hidrokarbon per bulan, sedangkan tiap bulan ia baru mendapat permintaan 4-5 ton. Bila nanti semua pemilik gedung di seluruh Indonesia sadar akan pentingnya hidrokarbon untuk menggantikan freon dengan lingkungan yang lebih sehat, maka diperkirakan kebutuhan akan hidrokarbon bisa mencapai 100.000 ton per tahun. Artinya, masih ada celah yang menganga untuk bisnis ini.

Menurut Aryadi, penggunaan AC hi-

drokarbon itu saat ini sangat cocok dengan semangat Instruksi Presiden (Inpres) No. 10 Tahun 2005 tentang Penghematan Energi. Inpres ini kemudian ditindaklanjuti dengan pencaangan penguangan jam buka mal, tayang televisi, dan pemakaian listrik di berbagai instansi pemerintah. Sekadar informasi, selama ini pemakaian AC berbahan pendingin freon

”SETELAH SISTEM AC SENTRALNYA MEMAKAI HIDROKARBON JENIS HCR-22, PENGELUARAN LISTRIK BULANAN HOTEL ITU MENUKIK MENJADI SEKITAR Rp 400 JUTA-Rp 220 JUTA”

menyedot 60 persen penggunaan listrik dalam sebuah gedung. Sisanya, terdistribusi untuk penggunaan lampu, eskalator, air, dan lain-lain.

Bahwa AC berbahan pendingin hidrokarbon ini bisa menghemat listrik, itu telah dibuktikan pada sistem pendingin Hotel Gran Melia sejak tiga tahun yang lalu. Setelah sistem AC sentralnya memakai hidrokarbon jenis HCR-22, pengeluaran listrik bulanan hotel ini menukik menjadi

sekitar Rp 400 juta-Rp 420 juta. Sebelumnya ketika masih memakai AC berbahan freon, pengeluaran per bulan hotel di bilangan segitiga emas Jakarta ini untuk listrik mencapai sekitar Rp 500 juta.

Kendati begitu, hidrokarbon bukannya tak memiliki kelemahan. Hidrokarbon bisa terbakar pada suhu 400 derajat celsius. Sedangkan freon tidak mudah terbakar. Freon baru bisa terbakar pada suhu lebih tinggi, yaitu 600 derajat celsius.

Untuk mengurangi kelemahan tersebut, Aryadi mengembangkan hidrokarbon generasi kedua yang lebih tahan bakar pada 1994. Campurannya tetap, yaitu propan, isobutan, dan normal butan. Hanya ditambah zat adiktif yang disebut *low flammability suppressant* (LSF). Untuk generasi terbaru ini, Aryadi segera mematenkan hasil penemuan dan menamakannya LSF. Bisa dikatakan juga, "Ini paten satu-satunya tentang hidrokarbon dengan tiga campuran di dunia," ujarnya.

Ngomong-ngomong, bukankah teknologi hidrokarbon untuk *refrigerant* ini su-

dah ada dari dulu? Ya. Tapi, menurut Aryadi, hidrokarbon yang dibuat di luar negeri hanya terdiri dari dua campuran, yaitu propan dan isobutan murni. Ternyata untuk daerah tropis, hidrokarbon dengan tiga campuran tadi lebih sesuai dengan iklim Indonesia. Ini membuat hidrokarbon hasil penelitian Aryadi dkk lebih hemat energi dibandingkan dengan hidrokarbon yang diimpor dari Belanda dan Australia. □

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH FORUM
 MAJALAH PILARS
 MAJALAH TRUST

NODE: LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 6

TAHUN 2005

Indonesia's electricity shortage: Challenges to a lasting solution

John McBeth
The Straits Times
Asia News Network/Singapore

Given the constraints it has been working under, Indonesia's state-run power utility, Perusahaan Listrik Negara (PLN), has done a remarkable job keeping the lights on over the past few years.

But time is fast running out. The Aug. 18 electricity blackout across much of Java has underlined the increasingly precarious supply situation on the Java-Bali grid and the urgent need for an energy road map to avoid a crisis in the next decade.

Unless more private investment can be pumped into the power sector, PLN will never be able to meet the 2,400MW in new capacity that planners say must be brought on line yearly to keep pace with demand as the country strives to return to 6-7 percent growth rates.

Says one worried power executive: "What happened on Aug. 18 will happen again, there's no doubt about that."

In a delicate balancing act, PLN has already curtailed supply to the industrial sector and refused new connections to private homes in a losing effort to maintain a tiny reserve on a grid that has an installed capacity of 18,500MW, but never gets beyond 14,500MW.

In fact, the company's own website has forecast peak demand this year at 16,965MW. And even then, that represents a growth rate of only 7.3 percent, well below the 11.5 percent recorded in 2001 before it began reining in demand.

PLN even calls Jakarta's industrial estates most week-days and instructs them to use their own generators

15 a.

between 5 p.m. and 8 p.m., just to ensure there is sufficient power during the peak-load period.

Exacerbating the situation has been the seven-year delay in completing the 800km-long southern transmission line to bring much-needed electricity from East Java's giant 3,200MW Patiton complex to the power-starved area of West Java.

Hindered by contractual, financial and land disputes, the line is finally expected to be completed by the end of the year, helped by new legislation which allows the government to override the opposition of property owners standing in the way.

PLN can currently transfer only 1,600MW from east to west, along its existing northern transmission line; Patiton and other East Java power stations generate 5,300MW between them — much more than is needed in the east.

Experts say that besides bringing additional power into West Java, the southern line will add stability to the grid, preventing the sort of massive outages that occurred on Aug. 18 when units at Patiton and the Suralaya complex at the opposite end of Java tripped together.

It is not at all clear where the country's future power will come from. Sumitomo's 1,320MW Tanjung Jati B station in Central Java, a second Japanese-financed 730MW station at Cilegon in West Java and a Chinese-funded 600MW station at Cilacap on the southern coast are all due to be commissioned in mid-2006.

But there are still questions over whether Sumitomo, in particular, has secured a domestic coal contract at a time when much of Indonesia's production has been

diverted to exports.

With China reducing exports to meet rising domestic demand, Indonesia is now the world's second-biggest coal exporter after Australia. Analysts say more than 70 percent of this year's production of 157 million ton will be exported as big companies like Arutmin and Kaltim Prima Coal ramp up output and foreign buyers seek long-term contracts as a hedge against soaring oil prices. World thermal coal prices have risen sharply from US\$24 (S\$40) to as high as \$43 a tonne over the past three years.

The three new power stations to be opened next year are all being built with public money. But the government's debt burden means it must start attracting more private producers.

That will not be easy after what happened during the 1997-1998 financial crisis when 18 power projects were either scrapped or companies were forced to re-negotiate their contracts at lower rates of return.

In the meantime, more thought has to be given to drastically reducing PLN's dependence on fuel oil and diesel, which adds up to 29 percent of the grid's operating capacity and absorbs 60-70 percent of the utility's spending. Oil costs 10 U.S. cents per kilowatt hour against 1.5 to 2 U.S. cents for coal and natural gas — the main reason why PLN is carrying a \$5 billion debt.

In a country rich in natural resources, many of PLN's problems stem from Indonesia's failure to boost refinery capacity, end market-distorting subsidies and develop other energy substitutes. With total reserves of 183 trillion cu ft, natural gas is an obvious choice. Yet, while about 35 percent of its plants

are designed for gas operation, only 20 percent are actually using the fuel. The rest are still burning oil, either because of flagging gas supplies or because the projects have not been married to a gas supply.

There are also other factors at play. With gas from offshore fields to Jakarta's two main power stations running out, PLN sprang a surprise last year by electing to build a \$400 million liquid natural gas (LNG) terminal, instead of taking gas from a 660km pipeline, now being laid from South Sumatra to Jakarta.

Mostly it was about securing a measure of operational independence it has never had. But while the plan may make sense in the longer term, LNG costs 30 percent more than piped gas — and that is drawing strong government resistance.

Pipeline operator Perusahaan Gas Negara (PGN) is adding 180 new customers to its existing base of 670-strong industrial customers around Jakarta, many of whom are likely to go back to using PLN as a back-up — just as they did when using private generators guzzling subsidized diesel made more sense than hooking up to the power grid.

That may relieve some of the pressure on PLN, but it will also put a dent in the most profitable side of its business.

Signs now are that PLN may have been forced to have a rethink. Industry sources say the utility and PGN are planning to form a consortium to build a new 1,100km, \$1.7 billion pipeline from gas-rich Kalimantan to Central Java.

Where it goes from there — west to Jakarta or east to Surabaya — is still under discussion.